

HAMBATAN LSM KUNTI BHAKTI DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI JABATAN LEGISLATIF KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014

Ni Putu Lisa Purnama Sari¹⁾, Ketut Putra Erawan²⁾, Bandiyah³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: lisapurnama405@yahoo.com¹⁾, ketuterawan2@yahoo.com²⁾, dyah_3981@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

In 2014, Kunti Bhakti LSM contributed a role to improve women's representation in the legislative position. However, the level of representation of women in the legislature of Tabanan Regency in Legislative Elections in 2014 did not reach 30%. The purpose of this thesis is to know how the obstacles of Kunti Bhakti LSM in improving women representation in the legislative position of Tabanan Regency in 2014. The theories that used in this research are liberal Feminist theory and Postfeminist theory. The researcher used qualitative method. Based on the result of the reseach, there is non-governmental organization in the legislative election of 2014 that contributed a role to improve women's representation in the legislative position of Tabanan Regency, namely Kunti Bhakti LSM. The efforts that have been made by Kunti Bhakti LSM is to have become a KPU relation and provided the capacity building for women legislative candidates. However, these efforts were experiencing some obstacles, the first is the internal factors derived from the Kunti Bhakti LSM that is still difficult to awaken women to take a part of the political. The second comes from external factors in which the obstacles of political parties where political parties tend to nominate men than women, because there is still a patriarchal culture in Tabanan regency, the cost candidates, the lack of women's understanding of politics, the potential women and the difficulty in getting permission from the family.

Keywords : LSM, Legislative , Women Representation

1. PENDAHULUAN

Budaya patriarki adalah sebuah struktur masyarakat dimana kekuasaan selalu berada ditangan kaum laki-laki. Dalam struktur seperti ini kaum perempuan tidak mendapat tempat, kecuali menumpang pada kedudukan suami, ayah, atau anak laki-lakinya. Adanya budaya patriarki membuat peran perempuan dalam ruang publik menjadi terbatas. Pada dunia politik, salah satu persepsi yang melemahkan kaum perempuan adalah paradigma bahwa politik hanya dimiliki dan dikuasai oleh kaum laki-laki, bahkan

beberapa pihak beranggapan, kaum perempuan tidak mampu memimpin bahkan membuat kebijakan tertentu.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi memberikan peluang yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam pengambilan kebijakan untuk mencapai keadilan dalam berpolitik. Di era reformasi kesempatan kaum perempuan untuk lebih aktif berkecimpung didunia politik semakin terbuka lebar. Trend politik saat ini lebih membuka keterlibatan perempuan pada partai politik, mengingat partai politik

merupakan suatu wadah yang strategis bagi kaum perempuan untuk dapat terjun ke dunia politik, dengan melakukan perekrutan kepada perempuan diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan pada jabatan legislative.

Adanya sistem kuota bagi calon politisi yang menyebabkan masalah keberadaan kaum perempuan diperhatikan. Selama ini perempuan sangat minim kiprahnya dalam panggung politik disebabkan oleh faktor budaya, pendidikan maupun ekonomi, hal ini menyebabkan posisi perempuan masih lemah di bandingkan laki-laki, sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut perempuan harus mengambil kesempatan untuk berperan dalam perumusan kebijakan, namun adanya kesempatan tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh perempuan di Kabupaten Tabanan untuk terlibat dalam dunia politik. Walaupun munculnya Eka Wiryastuti sebagai Bupati Perempuan pertama yang telah menjabat selama dua periode justru belum mampu mendongkrak tingkat keterwakilan perempuan di jabatan legislative Kabupaten Tabanan yang hanya diwakilkan oleh tiga orang perempuan.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan untuk menduduki posisi jabatan legislative di Tabanan membawa tugas berat bagi organisasi-organisasi pro perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan legislative. Untuk membantu

meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan politik fungsi partai sebagai penggerak politik menjadi perhatian utama untuk ditingkatkan terutama dalam penjurangan kader sampai pada kaderisasi. Disisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki peran yang besar untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam jabatan politik. Salah satu LSM yang peduli dengan pemberdayaan perempuan khususnya di dunia politik adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Kunti Bhakti yang terletak di kabupaten Tabanan.

Dalam menjalankan perannya LSM Kunti Bhakti tidak hanya menangani kasus-kasus pada kekerasan perempuan, anak, dan lingkungan, tapi LSM ini juga mempunyai perhatian terhadap pemberdayaan politik perempuan. LSM Kunti Bhakti berupaya untuk mendorong perempuan untuk maju dalam pencalegan pada Pileg 2014 karena keterwakilan perempuan dalam jabatan legislative di Kabupaten Tabanan masih rendah. Upaya yang dilakukan oleh LSM Kunti Bhakti untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pileg 2014 dengan menjadi relasi KPU, memberikan penguatan kapasitas bagi para calon anggota legislative, serta caleg perempuan juga dipertemukan dengan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di daerah pilihan masing-masing caleg.

Upaya yang telah dilakukan LSM Kunti Bhakti dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan legislative pada pileg 2014 nyatanya belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan pada jabatan legislative, terlihat dari empat puluh anggota legislative yang terpilih di Kabupaten Tabanan

presentase keanggotaan perempuan hanya diwakili oleh tiga orang perempuan.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimana Hambatan LSM Kunti Bhakti dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif Kabupaten Tabanan tahun 2014?”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian lain yang telah dilakukan dapat dijadikan acuan atau pegangan ataupun refrensi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Dari beberapa penelitian yang terdahulu, penulis mengambil dua sampel penelitian yang dijadikan acuan dan refrensi dalam tulisan ini. Berikut dua penelitian yang terkait dalam penelitian ini:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan penelitian Candra Sitorus (2015) yang dimana judul penelitiannya adalah “Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) koalisi perempuan indonesia (kpi) Kota Semarang dalam pemberdayaan politik perempuan di Kota Semarang”.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lusi, Puspika Sari (2016) yang dimana judul penelitiannya adalah “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Nurani Perempuan Dalam Pemberdayaan Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2014 Di Sumatera Barat”.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Lembaga Swadaya Masyarakat

Secara umum Lembaga Swadaya Masyarakat diartikan sebagai organisasi yang

didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang dalam menjalankan kegiatannya organisasi ini secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan.

Organisasi seperti LSM terbentuk dari komitmen sejumlah masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun dalam bidang politik. misalnya dalam bidang politik, kalangan aktivis perempuan merasa prihatin dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif. Hal ini menjadi tugas aktivis perempuan untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan untuk terjun didunia politik. Karena peran aktivis perempuan diharapkan mampu merobohkan konstruksi sosial berupa mitos, citra dan prasangka negatif yang dapat merugikan keberadaan perempuan untuk terjun dalam dunia politik.

2.2.2 Kandidat Legislatif

Kandidat legislatif adalah orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak yang setara dalam segala bentuk kehidupan dimasyarakat termasuk dalam kegiatan politik, tidak hanya memberikan hak suaranya pada saat pemilu, masyarakat juga berhak untuk ikut mendaftarkan diri sebagai salah satu kandidat legislatif yang tentunya telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan partai politik.

Dengan adanya peluang bagi masyarakat untuk dapat mendaftarkan dirinya menjadi kandidat legislatif diharapkan mampu

membuka peluang bagi perempuan untuk bisa terlibat menjadi kandidat legislatif, ditambah lagi adanya peraturan dari KPU No. 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislatif pasal 11 menyatakan dalam mengajukan daftar bakal calon legislatif calon partai politik diwajibkan menyertakan perempuan sekurangnya 30% dari setiap pemilihan.

2.2.3 Posisi Perempuan di Jabatan Politik

Kehadiran perempuan pada posisi jabatan politik khususnya pada jabatan legislatif memberikan pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan perempuan, karena dalam menjalankan tugasnya seorang anggota legislatif mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak menyampaikan usul dan pendapat, hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil, dan hak melakukan sosialisasi undang-undang. Dengan adanya hak yang diberikan oleh seorang anggota legislatif akan mempermudah perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini dikesampingkan oleh laki-laki. Tentu banyak persoalan lain yang menyangkut masalah keperempuanan yang selama ini belum terealisasi dengan tuntas, akan memungkinkan diselesaikan secara *substansial* dan serius.

Landasan Teori

2.3.1 Teori Feminis Liberal

Teori feminis liberal pertama kali dirumuskan oleh Marry Wollstonecraft (1759-1799) dalam tulisan "*The Vindication Of The Right Of Women*" dan John Stuart Mill dalam

tulisannya "*The Subjection Of Women*", kemudian Betty Frei dalam tulisannya "*The Feminim Mystique*" dan "*The Second State*". Akar pemikiran munculnya aliran feminis liberal adalah pengalaman perempuan yang secara pribadi tidak bebas menentukan hidup. Sejak lahir dalam keluarga, pribadi perempuan sudah diatur bergantung kepada bapak, suami atau laki-laki yang lain. Bahkan negara juga mengontrol setiap pribadi perempuan. Dalih "melindungi kaum perempuan", yang justru perempuan tidak bebas secara individu.

Gerakan feminis liberal menjadi acuan untuk LSM Kunti Bhakti agar perempuan tidak laki berada dibawah laki-laki dan perempuan dapat bebas untuk mengekspresikan potensi mereka pada segala bidang. Sama seperti definisi dari teori feminis liberal, LSM Kunti Bhakti khususya dalam bidang politik menginginkan perempuan agar dapat berkiprah dalam dunia politik untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di jabatan legislatif membawa tugas bagi LSM Kunti Bhakti untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif Kabupaten Tabanan.

2.3.2 Teori Postfeminis

Menurut Ann Brooks, Munculnya posfeminis sebagai gerakan feminis pembebasan. Dimana kemunculan posfeminis menyentuh isu-isu yang bertentangan dikalangan feminis, seperti adanya pembagian area bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam dunia publik dan dunia privat, pembagian kerja dalam keluarga maupun karir, ideologi posfeminis justru menginginkan perempuan agar terbebas dari

keadaan struktur sosial yang hirarkis yang berkaitan dengan pembagian area bagi kaum laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki berada pada ruang publik sedangkan perempuan cenderung berada dalam ruang privat. Namun pembebasan tersebut masih terhambat dengan adanya sekat-sekat struktural yang masih melekan di pandangan masyarakat sehingga perempuan masih kesulitan untuk membebaskan diri mereka.

Teori postfeminis lebih melakukan penekanan bahwa perempuan dapat berkontribusi lebih dan dapat memiliki kesan maskulin disaat melakukan pekerjaan secara professional. Hal itu menyebabkan terjadi beberapa kendala berupa kurangnya pengakuan perempuan sebagai pemimpin yang tegas dan maskulin dimasyarakat akibat masih adanya sekat-sekat struktural.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini juga menggunakan unit analisa yang dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah, organisasi, katagori sosial, lembaga sosial, Negara dan lainnya. Sedangkan objek penelitian yang akan dianalisis adalah hambatan LSM Kunti Bhakti dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif, sehingga nantinya peneliti dapat menganalisa hambatan LSM Kunti Bhakti dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif kabupaten Tabanan.

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti akan mencatat semua data yang berhasil dikumpulkan, yang selanjutnya akan disusun dengan bentuk

uraian yang terperinci, kemudian direduksi dengan memilah hal-hal pokok yang sesuai tema, lalu peneliti akan mengambil kesimpulan dari semua data yang diperoleh.

Selain itu peneliti menggunakan informan kunci dan informan tambahan. Dalam penentuan informan dipilih berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Selanjutnya pengumpulan data menggunakan reduksi yang dapat peneliti pilih untuk dijadikan satu agar dapat diolah dengan menyajikan data, lalu peneliti dapat menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan adalah salah satu dari 9 kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Indonesia yang terletak sekitar 35 Km disebalah barat Kota Denpasar. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33Km² atau 14,90% yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai, sehingga sebagian besar penduduk di Kabupaten Tabanan bermata pencaharian sebagai petani maupun nelayan.

Tidak hanya memiliki potensi dalam bidang pertanian yang sangat terkenal, Kabupaten Tabanan juga sangat terkenal dengan potensi pariwisatanya yang sangat mengagumkan, seperti obyek wisata yang menjadi ikon Kabupaten Tabanan Tanah Lot, Bedugul, JatiLuwih. Selain pertanian dan pariwisata Kabupaten Tabanan terkenal dengan industri kerajinan seperti industry

kerajinan anyaman bambu, kayu, keramik, gerabah, logam dan perak.

4.1.2 Keadayaan Politik Kabupaten Tabanan

Tabanan merupakan salah satu Kabupaten pertama yang memiliki pemimpin perempuan yang telah menjabat selama dua periode. Kepemimpinan Eka Wiryastuti sebagai pemimpin perempuan pertama di Kabupaten Tabanan telah membuktikan bahwa perempuan dapat berkiprah di dunia politik.

Keberhasilan Eka Wiryastuti sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tabanan belum sepenuhnya dapat meningkatkan minat perempuan untuk dapat terjun ke dunia politik, terlihat masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan dan yang menduduki jabatan strategis di legislatif di Kabupaten Tabanan.

4.1.3 Profil LSM Kunti Bhakti

Tujuan berdirinya LSM Kunti Bhakti adalah Sebagai wadah untuk menghimpun diri bagi sesama perempuan tabanan khususnya, sebagai wadah komunikasi dan informasi sesama perempuan tabanan dan masyarakat umumnya, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Tabanan dan Bali pada umumnya, sebagai wadah dalam keikutsertaan membangun, memelihara dan menjaga adat istiadat, dan kebudayaan Bali. Sasaran yang ingin dicapai dari wadah organisasi ini adalah memacu semangat bangkitnya para perempuan Tabanan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan turut membangun Tabanan dan Bali sampai masa yang berkelanjutan.

4.2 Hasil Temuan

4.2.1 Peran LSM Kunti Bhakti

Kehadiran LSM Kunti Bhakti diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Legislatif Kabupaten Tabanan. Disini LSM Kunti Bhakti tidak hanya menangani kasus kekerasan perempuan, anak, dan lingkungan, tetapi LSM ini juga mempunyai perhatian terhadap pemberdayaan politik perempuan. Pada Pileg 2014 upaya yang dilakukan oleh LSM Kunti Bhakti untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif adalah menjadi relasi (relawan demokrasi) KPU disegmen perempuan untuk memberikan sosialisasi kepada induk partai tentang kuota 30% perempuan sebagai calon dipartai politik dan memantau partai politik yang ikut di arena pileg, disini LSM kunti Bhakti mempunyai kapasitas untuk mendapatkan data jumlah caleg perempuan.

LSM Kunti Bhakti ditunjuk oleh SFCG (*Search For Common Ground*) untuk menjadi fasilitator, disini peran LSM Kunti Bhakti memberikan penguatan kapasitas kepada calon leg. Disini peran dari LSM Kunti Bhakti untuk memberikan penguatan kapasitas kepada caleg perempuan adalah bagaimana mendorong perempuan yang awalnya hanya memenuhi kuota, oleh induk partai perempuan hanya dijadikan pelengkap penderita.

Pada penguatan kapasitas tersebut calon legislatif perempuan diberikan motivasi dan dibimbing dengan baik agar tidak menjadi pelengkap penderita oleh induk partai. Model penguatan kapasitas yang diberikan seperti mengadakan seminar maupun workshop selain itu caleg perempuan juga dipertemukan dengan masyarakat, dimana celeg

perempuan dapat berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dapil tersebut. Dengan adanya dialog langsung yang dilakukan oleh caleg diharapkan dapat mengatasi permasalahan di dapil tersebut jika terpilih nantinya.

4.2.2 Hambatan LSM Kunti Bhakti

Dari upaya yang dilakukan oleh LSM Kunti Bhakti untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif nyatanya mengalami hambatan. Yang pertama hambatan yang berasal LSM Kunti Bhakti, dimana LSM Kunti Bhakti masih kesulitan untuk menyadarkan perempuan untuk terjun ke dunia politik. Hal ini dikarenakan perempuan masih enggan untuk bergelut dengan dunia politik. Mereka menganggap bahwa untuk terjun ke dunia politik mereka harus mengeluarkan uang yang sangat banyak, politik juga identik dengan korupsi, selain itu mereka juga tidak siap untuk terjun ke dunia politik karena mereka tidak paham tentang politik padahal dengan adanya LSM Kunti Bhakti perempuan-perempuan yang tertarik masuk ke dunia politik dan memiliki potensi akan dibina sebaik mungkin, namun karena faktor keluarga juga perempuan-perempuan tersebut enggan untuk terjun ke dunia politik.

Selama ini pemerintah telah memperjuangkan hak-hak perempuan dengan merancang undang-undang yang mengharuskan kuota 30% keterwakilan perempuan di jabatan legislatif, ditambah lagi Pemerintah juga telah merancang UUD No 6 pembangunan bangsa istilahnya pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia sudah dibangun dan ditentukan arah pembangunannya salah satunya

adalah pembangunan yang *responsive gender*. Pembangunan yang *responsive gender* adalah seluruh komponen, baik itu disabilitas, marginal, minoritas itu tetap terbangun. Diharapkan perempuan tidak ingin dikatakan sebagai kaum marginal. Namun adanya undang-undang tersebut masih belum mampu menyadarkan perempuan akan pentingnya posisi perempuan di jabatan politik.

Selain hambatan yang berasal dari LSM Kunti Bhakti, hambatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif dikarenakan masih melekatnya budaya patriarki. Budaya patriarki memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan perempuan, masih saja ada ketidakadilan yang dialami perempuan, dimana perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Adanya budaya patriarki tersebut akan berpengaruh pada segala aspek dimana perempuan akan kesulitan untuk bebas mengekspresikan potensi yang dia miliki.

Budaya patriarki yang masih melekat di Bali akan berpengaruh pada segala aspek dalam kehidupan perempuan seperti kualitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai untuk terjun ke dunia politik, dimana Tingkat pendidikan masih sangat mempengaruhi pandangan masyarakat akan kualitas suatu individu, dimana para perempuan yang hendak maju menjadi caleg diharapkan memiliki pendidikan sarjana atau jika memungkinkan Strata 2.

Kedua, Izin dari keluarga sebenarnya adalah dampak dari konsep patriarki yang masih melekat di masyarakat Kabupaten Tabanan. Mayoritas bagian dari keluarga akan merasa bahwa perempuan harus

memilik fokus untuk menjaga keluarga ketimbang mengembangkan karir dibidang professional yang dapat menjadikan keluarga kurang mendapatkan perhatian. Ketiga, Kegiatan politik praktis di Kabupaten Tabanan masih memerlukan dana yang tidak sedikit bagi masing-masing calon legislatif, termasuk bagi calon legislatif perempuan. Hal tersebut menyebabkan perempuan kurang percaya diri untuk maju dalam kegiatan pemilihan legistlatif di Kabupaten Tabanan, mengingat jika dana yang digunakan telah habisterpakai dan jabatan politik tidak dimenangkan, maka kerugian yang besar akan ditanggung oleh masing-masing calon legislatif.

Terakhir, Partai politik lebih cenderung memilih laki-laki untuk menjadi calon anggota legislatif maupun lebih memperjuangkan calon legislatif laki-laki dibandingkan perempuan, walaupun adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dilegislatif tak jarang partai politik hanya menjadikan perempuan hanya sebagai pelengkap penderita untuk memenuhi kuota 30% tersebut.

4.3 Analisis Hasil Temuan

4.3.1 keterkaitan Teori Feminis Liberal Terhadap Peran LSM Kunti Bhakti Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Jabatan Legislatif.

Keterlibatan LSM Kunti Bhakti untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan leggislatif merupakan suatu upaya untuk menyadarkan perempuan akan pentingnya keberadaan perempuan di jabatan legislatif. Tidak hanya menyadarkan perempuan untuk berani terjun ke dunia politik,

perempuan-perempuan yang mencalonkan juga dibina dengan baik agar perempuan tidak menjadi pelengkap penderita.

Dari Upaya yang telah dilakukan oleh LSM Kunti Bhakti untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dilegislatif sesuai dengan paham feminisme liberal yang menjadi acuan LSM Kunti Bhakti yang menyatakan bahwa LSM kunti Bhakti ingin perempuan Kabupaten Tabanan mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan potensi mereka diruang publik, Sesuai dengan paham feminis liberal seharusnya sudah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Sehingga perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Maka dari itu beberapa hambatan seperti pendidikan dan permodalan seharusnya dapat ditingkatkan lagi bagi para wanita yang hendak terjun dalam dunia politik agar hambatan tersebut dapat diminimalisir dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif di Kabupaten Tabanan. Walaupun Feminis liberal menginginkan perempuan agar bisa terbebas dan tidak berada dibawah laki-laki.

4.3.2 Keterkaitan Teori Postfeminis Terhadap Hambatan LSM Kunti Bhakti Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Jabatan Legislatif.

Kemunculan Postfeminis sebenarnya ingin menyadarkan perempuan bahwa mereka juga dapat melakukan pekerjaan pada kedua area yakni area privat maupun

area publik tanpa menolak nalurinya untuk membangun dan berperan dalam keluarga. Pembebasan tersebut dilakukan untuk melawan beroperasinya struktur kekuasaan, hegemoni patriarki serta untuk memerdekakan diri.

Masih melekatnya budaya patriarki di pikiran masyarakat Kabupaten mengakibatkan perempuan selalu dianggap lebih pantas bekerja pada area privat dibandingkan pada area publik, ini berarti kedudukan perempuan selalu dinomerduakan, akibat dari budaya patriarki tersebut menyebabkan perempuan terkadang menjadi subordinasi laki-laki.

Hal itu menyebabkan terjadi beberapa kendala berupa kurangnya kesempatan perempuan untuk dapat bekerja di ruang publik. Akibat dari pola pikir masyarakat yang kurang memahami tentang postfeminisme, beredar anggapan bahwa perempuan kurang layak bekerja di ruang publik dimana ruang publik sangat identik dengan laki-laki yang tangguh dan maskulin, dimana hal tersebut membuat banyak dari masyarakat masih meremehkan perempuan dalam pemilihan legislatif Kabupaten Tabanan tahun 2014.

Adanya sekat-sekat struktural tersebut menyebabkan LSM Kunti Bhakti kesulitan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Legislatif, karena kemunculan paham postfeminis belum dapat diterima sepenuhnya oleh lapisan masyarakat. Hal tersebut kemungkinan dipacu dengan rasio banyaknya perempuan rumah tangga yang tidak bekerja di Kabupaten Tabanan, sehingga simbol subjek "perempuan" kurang dianggap memiliki potensi yang tinggi terutama dalam hal politik praktis dipemerintahan. Praktis paradig

tersebut akan membuat hambatan bagi perempuan untuk berusaha maju dalam politik praktis sebagai dewan legislatif di Kabupaten Tabanan.

Akibat dari sekat-sekat struktural seperti masih melekatnya budaya patriarki mengakibatkan LSM Kunti Bhakti kesulitan untuk menyadarkan perempuan akan pentingnya keberadaan perempuan di Legislatif, karena masih melekatnya budaya patriarki akan berpengaruh pada aspek-aspek lainnya seperti tidak mengizinkan perempuan untuk terjun ke dunia politik. Adanya sekat-sekat struktural tersebut mengakibatkan terhambatnya perempuan untuk bisa membebaskan diri mereka.

5. KESIMPULAN

Tingkat keterwakilan perempuan di jabatan legislatif kabupaten Tabanan masih tidak mencapai kuota 30% sesuai dengan aturan pemerintah yaitu hanya diwakili oleh tiga orang perempuan saja, padahal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif di Kabupaten Tabanan terdapat sebuah lembaga swadaya masyarakat yaitu Kunti Bhakti untuk ikut berperan meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif.

Dari upaya yang dilakukan oleh LSM Kunti Bakti untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif nyatanya keterwakilan perempuan pada pileg 2014 hanya diwakili oleh tiga orang perempuan saja, ini berarti LSM Kunti Bhakti masih kesulitan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jabatan legislatif. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan faktor internal. *Pertama* berasal dari faktor internal LSM Kunti Bhakti juga mengalami hambatan

seperti masih sulitnya menyadarkan perempuan untuk terjun ke dunia politik. Hal ini dikarenakan perempuan masih enggan untuk bergelut dengan dunia politik. Mereka menganggap bahwa untuk terjun ke dunia politik mereka harus mengeluarkan uang yang sangat banyak, politik juga identik dengan korupsi, selain itu mereka juga tidak siap untuk terjun ke dunia politik karena mereka tidak paham tentang politik padahal dengan adanya LSM Kunti Bhakti perempuan-perempuan yang tertarik masuk ke dunia politik dan memiliki potensi akan dibina sebaik mungkin, namun karena faktor keluarga juga perempuan-perempuan tersebut enggan untuk terjun ke dunia politik.

Kedua, berasal dari faktor eksternal dimana budaya patriarki masih menjadi faktor penghambat perempuan untuk terjun ke dunia politik, dimana perempuan selalu dianggap berada dibawah laki. Adanya paradigma tersebut membuat perempuan memiliki keterbatasan untuk terjun ke dunia politik. Selain dari adanya budaya patriarki, rendahnya keterwakilan perempuan dilegislatif dikarenakan masih partai politik lebih cenderung memilih calon laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Jikapun ada perempuan yang ingin mencalonkan sebagai calon anggota legislatif mereka masih terhambat dengan izin dari keluarga dan modal yang dikeluarkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif tidak sedikit.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bukul

Affan Gaffar. (1997). NGO/LSM, Ruang Publik, dan Civil Society di Indonesia.

- Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Brooks, Ann. (2011). *Postfeminis & Cultural Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. (Terjemahan S Kunto Adi Wibowo). Yogyakarta: Jalasutra.
- Jones, P., Bradbury, L., Boutillier, S.L. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Edisi ke 2. Diterjemahkan oleh: Ahmad Fedyani Sahfuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lovenduski, Joni. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisus.
- Kristiyanto, E. (2005). *Sinar Sabda Dalam Prisma, Hermeneutika Kontekstual*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus.
- Muhammad, Husein. (2007). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Murniati, A. Nunuk. P. (2004). *Getar Gender Edisi Pertama*. Magelang Indonesiatara.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rokmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme : Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014) *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Tong, Rosemarie Putnam. (1998). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. (Terjemahan Aquarini Priyatna Prabasmoro). Bandung: Jalasutra.
- Verma, S.P. (1992). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali.

Jurnal/Skripsi :

Candra Sitorus. 2015. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota*

Semarang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

<http://www.suarakalimantan.com/2014/01/pengertian-pendirian-lsm>. diakses pada tanggal 22 Februari 2017. Pukul 20.00 Wita.

Lusi Puspika. 2016. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Nurani Perempuan Dalam Pemberdayaan Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2014 Di Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Andalas Padang. Sumatra Barat.

Website:

https://media.unpad.ac.id/thesis/170820/2011/170120110503_3_1418.pdf diakses pada tanggal 22 Januari 2017. Pukul 14.00 Wita.

<http://www.id.baliglory.com/2015/07/taban-an-bali.html>. diakses pada tanggal 19 Mei 2017. Pukul 19.30 Wita.

<http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 13.00 Wita.

<http://pemksm.jabarprov.go.id> diakses pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 14.00 Wita.

<http://ppid.kpu.go.id> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 13.00 Wita.

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/kab.tabanan/BPS>. diakses pada tanggal 19 Mei 2017. Pukul 21.00 Wita.

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11084/.Skripsi%20MULYASARI%20A_KMUL.Pdf;sequence=1 diakses pada tanggal 15 Februari 2017. Pukul 12.00 Wita.

<http://www.esquire.co.id/.article/2014/3/368-keterwakilan-politik-perempuan>. diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 15.00 Wita.

<http://www.pemilu.com/.caleg/> diakses pada tanggal 15 Februari 2017. Pukul 11.00 Wita.